



Dampak Konflik Kashmir dalam Sejarah Sosial Ekonomi India

Desi Nur Rohmah¹, Nuryuana Dwi Wulandari²

¹ Faculty of Social Sciences Education, IKIP PGRI Wates, Indonesia. E-mail: desinurrohmah1211@gmail.com

² Faculty of Social Sciences Education, IKIP PGRI Wates, Indonesia. E-mail: nuryuanadwiwulandari18@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

India-Pakistan, Conflict, Kashmir, Bangladesh

Kata kunci:

India-Pakistan, Konflik Kashmir, Bangladesh

How to cite:

Rohmah, D.N., & Wulandari, N.D. (2024). Dampak Konflik Kashmir dalam Sejarah Sosial Ekonomi India. *Jambura History and Culture Journal*, 6 (2), 146-158.

DOI:

10.37905/jhcj.v6i2.23963

Submitted : 05 Januari 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 31 Juli 2024

ABSTRACT

South Asia consists of Afghanistan, Pakistan, India, the Maldives, Sri Lanka, Bhutan, and Nepal. These countries share a history of European colonization, similar climates, and close proximity. India is known as one of the oldest civilizations, while Pakistan is the largest Muslim-majority country with a diverse ethnic background. The researcher studies the conflict between India and Pakistan using a literature study method. The research examines the Kashmir conflict, which began with territorial disputes between Hindus and Muslims in India, developed into a prolonged conflict between India and Pakistan, and led to the creation of Bangladesh in 1971. The conclusion is that cultural and religious differences prompted the partition of India.

ABSTRAK

Negara-negara ini memiliki sejarah penjajahan Eropa, iklim yang serupa, dan letak yang berdekatan. India dikenal sebagai peradaban tertua, sedangkan Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dengan etnis yang beragam. Peneliti mempelajari konflik antara India dan Pakistan menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini mengkaji konflik Kashmir yang dimulai dari perebutan wilayah oleh Hindu dan Muslim di India, berkembang menjadi konflik panjang antara India dan Pakistan, dan memunculkan Bangladesh pada tahun 1971. Kesimpulannya, perbedaan budaya dan agama mendorong pembagian India.

Copyright © 2024 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang berada di benua Asia. Kawasan ini menjadi penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, serta menjadi penggerak perekonomian di kawasan Asia dalam bidang perdagangan (Haqqi & IP, 2021). Negara-negara yang berhubungan dengan perdagangan di kawasan tersebut, diantaranya Asia, Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Eropa,

dan Timur Tengah. Dengan demikian kawasan Asia Selatan menjadi bagian penting dalam ekonomi politik berbagai negara. Secara geografis kawasan Asia Selatan, berada di sebelah utara berbatasan dengan Asia Tengah, timur berbatasan dengan Asia Timur, sisi tenggara berbatasan dengan Asia Tenggara, bagian barat Asia Selatan berbatasan dengan Asia Barat, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan, Pegunungan Himalaya adalah perbatasan utara dan timur Asia Selatan, dan Laut Arab serta Teluk Benggali adalah perbatasan selatan. Selain menjadi kawasan perairan di Asia selatan juga mempunyai daerah pegunungan. Pegunungan Hindu Kush di Afghanistan dan Pakistan utara umumnya dianggap sebagai perbatasan barat laut anak benua India.

Kawasan Asia Selatan terdiri dari beberapa negara diantaranya Afganistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maladewa, Sri Langka, Bhutan, Nepal (Kristiawan & Iskandar, 2020). Negara-negara yang berada di kawasan mempunyai latar belakang yang hampir sama, seperti pernah dijajah oleh bangsa Eropa, mempunyai iklim yang sama antar negara, daerah-daerah yang hampir berdekatan antar negara satu dengan yang lain. Hal-hal tersebut jika tidak dapat disikapi dengan baik dan positif akan membawa konflik baru untuk negara-negara tersebut bahkan berdampak untuk internasional. Salah satu konflik yang terjadi ialah konflik antara pakistan dengan India.

India merupakan negara yang terletak di Asia Selatan. India terkenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia dengan keberagamannya. India memiliki beberapa budaya yang unik serta masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan bahasa. Jauh sebelum masehi, pola kerjaan-kerjaan mendominasi kawasan ini. Dengan demikian menunjukkan keberhasilan yang signifikan di berbagai bidang perdagangan, politik, masyarakat, agama dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut terlihat dari filsafat India yang telah memberikan kontribusi penting dalam bidang spiritual, etika, moralitas, agama, bahasa dan ilmu penting lainnya. India berbatasan langsung dengan negara Pakistan. Kedua negara tersebut mempunyai Sejarah yang

sama, pernah di jajah oleh bangsa Inggris. Awal mulanya Inggris hanya ingin menguasai India dibidang perdagangan melalui EIC (*English East India Company*) (Ayunda, 2017).

Pakistan merupakan negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, memiliki latar belakang etnis yang cukup beragam, antara lain Punjabi, Shindhi, Pathan, Baluch, dan India (Aisyah, 2014). Meskipun mayoritas penduduknya menganut agam Islam, Pakistan secara keseluruhan memiliki latar belakang agama yang sangat beragam. Pakistan sebagai negara merdeka bagi umat Muslim, diusulkan pertama kali oleh Muhammad Iqbal, seorang ulama asal Pakistan. Menurut beliau, India pada dasarnya terdiri dari dua negara besar, yaitu Muslim dan Hindu. Menurutnya, umat Muslim India harus berusaha untuk membentuk negara mereka sendiri yang terpisah dari negara Hindu di India.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Metode *library research* adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori berbagai literatur terkait penelitian. Mencari sumber, mengumpulkan dan menyusun data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang ada. Metode analisis deskriptif , Bahan pustaka yang diambil dari berbagai artikel, jurnal dengan analisis secara kritis dan mendalam untuk menunjang gagasan dan proposisi.

Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi sejarah yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, kemudian menganalisis dan menafsirkan informasi tersebut untuk memahami konteks dan makna peristiwa masa lalu. Metode *library research* bisa digunakan dalam berbagai topik, misalnya pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data untuk disajikan dan dibahas dalam bentuk penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Latar Belakang Konflik Kashmir

Konflik Kashmir muncul bermula dari perebutan wilayah India yang dihuni antara umat Hindu dan umat Muslim, berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Hal ini akan mengganggu pemulihan hubungan antara kedua pemerintahan dan menimbulkan hambatan yang sangat mengkhawatirkan terhadap hubungan kedua komunitas, Muslim dan Hindu di kedua negara (Hennida, 2012). Hambatan-hambatan ini terutama dirasakan di India, sekitar 140 juta umat Muslim di India mewakili minoritas terbesar dalam komunitas mayoritas Hindu yang berjumlah lebih dari 1 miliar orang. Terjadi pertempuran antara India dan Pakistan yang mengakibatkan luka mendalam (Charinda, 2019). Sebanyak tiga kali pada tahun 1947-1948, 1965, dan 1971. Secara geografis, wilayah Kashmir yang strategis karena Pegunungan Kashmir merupakan pintu gerbang alami antara Tiongkok, India, dan Pakistan. Bagi Pakistan, wilayah Kashmir sangat penting karena beberapa sungai besar mengalir melalui Kashmir, menyediakan air untuk irigasi pertanian. Tiga anak sungai Indus, yaitu Jhelum, Chenab, dan Ravi dengan mata air di Kashmir. Kashmir khawatir jika seluruh wilayah Kashmir dikuasai India, pasokan air dari empat sungai tersebut akan dibendung dan dialihkan ke India.

Pada tahun 1885, Partai Kongres India didirikan sebagai organisasi politik yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat India di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1906, Liga Muslim lahir sebagai organisasi yang khusus mewakili kepentingan komunitas Muslim di India. Kedua organisasi ini mencerminkan aspirasi dan kepentingan dua komunitas agama terbesar di India, yaitu Hindu dan Muslim, dengan Partai Kongres lebih berfokus pada komunitas Hindu dan Liga Muslim mewakili komunitas Muslim.

Perbedaan pandangan dan kepentingan antara dua komunitas ini tercermin dalam kepemimpinan kedua organisasi tersebut. Mahatma Gandhi,

yang lahir pada tahun 1869, menjadi tokoh utama Partai Kongres dan dikenal karena pendekatannya yang non-kekerasan dalam memperjuangkan kemerdekaan India. Di sisi lain, Muhammad Ali Jinnah, yang lahir pada tahun 1876, menjadi pemimpin terkemuka Liga Muslim dan berjuang untuk melindungi hak-hak Muslim dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Hindu. Meskipun berbeda dalam tujuan akhir, keduanya memainkan peran penting dalam gerakan nasional India.

Pada awalnya, Partai Kongres dan Liga Muslim mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan India dari Inggris. Hal ini dibuktikan dengan Pact Lucknow pada tahun 1916, yang merupakan kesepakatan antara kedua organisasi tersebut. Pact ini menunjukkan bahwa Inggris mengakui partisipasi India dalam Perang Dunia I dan, sebagai imbalannya, memberikan izin kepada Partai Kongres untuk menyelenggarakan pemilihan terpisah bagi komunitas Muslim. Selain itu, kesepakatan ini juga menetapkan dasar bagi kerja sama dalam pembuatan undang-undang dan konstitusi India dengan status dominion, yang menunjukkan upaya bersama untuk merumuskan masa depan India yang merdeka.

Perpecahan antara Partai Kongres dan Liga Muslim mulai terlihat jelas pada tahun 1935, ketika pemerintah Inggris memberikan otonomi pemerintahan kepada India. Hal ini memberi kesempatan kepada kedua organisasi tersebut untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sendiri melalui pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1937. Dalam pemilihan tersebut, Partai Kongres berhasil meraih kemenangan telak, yang memberikannya kekuasaan untuk memerintah sebagian besar wilayah India. Kemenangan ini menegaskan dominasi Kongres dalam politik India, sementara Liga Muslim merasa semakin terpinggirkan.

Kekecewaan Liga Muslim tidak hanya disebabkan oleh kekalahan suara di wilayah-wilayah mayoritas Muslim, tetapi juga karena Kongres menolak usulan mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi. Liga Muslim berharap dapat membentuk pemerintahan bersama dengan Kongres guna

memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim dalam pemerintahan yang baru. Namun, penolakan Kongres terhadap usulan ini memperdalam ketidakpercayaan dan rasa frustrasi di kalangan pemimpin Liga Muslim, yang merasa bahwa kepentingan komunitas mereka tidak akan diwakili secara adil dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Kongres.

Setelah penolakan ini, Liga Muslim mulai merumuskan rencana untuk mendirikan negara merdeka yang khusus bagi komunitas Muslim di India. Aspirasi ini secara resmi diartikulasikan dalam Resolusi Lahore pada tahun 1940, yang mengusulkan pembentukan negara terpisah yang disebut Pakistan, yang berarti "Tanah Suci." Resolusi ini menandai awal dari gerakan untuk menciptakan negara Pakistan, sebuah negara yang akan memberikan perlindungan dan representasi politik bagi Muslim di anak benua India. Perpecahan ini akhirnya mengarah pada pembagian India pada tahun 1947, yang menghasilkan dua negara merdeka, India dan Pakistan, dengan konsekuensi yang berdampak luas bagi sejarah dan politik kawasan tersebut.

Setelah Perang Dunia II, kekacauan dan kerusuhan berdarah antara umat Hindu dan Muslim di India semakin memuncak, menciptakan situasi yang tidak terkendali. Bentrokan ini mencerminkan ketegangan yang sudah lama ada antara kedua komunitas, yang diperburuk oleh ketidakpastian masa depan India pasca-perang. Melihat situasi yang semakin tidak stabil, pemerintah Inggris menyadari bahwa mempertahankan kontrol atas India akan menjadi tugas yang semakin sulit dan berisiko. Dalam kondisi seperti itu, Inggris tidak memiliki pilihan lain selain mempertimbangkan pembagian anak benua India sebagai solusi untuk meredakan konflik yang berkecamuk.

Keputusan untuk membagi anak benua India diambil secara resmi oleh pemerintah Inggris pada 1 Juli 1947 dengan disahkannya Undang-undang Kemerdekaan India. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi proses pembagian wilayah India menjadi dua negara merdeka. Ketika undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1947, India dan Pakistan secara resmi dinyatakan sebagai dua entitas yang terpisah dan berdaulat.

Pembagian ini diharapkan dapat mengakhiri konflik sektarian dan memberikan kesempatan bagi kedua komunitas untuk membangun pemerintahan mereka sendiri di wilayah yang mereka kuasai.

Setelah pembagian, Kekaisaran India yang baru merdeka berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Lord Mountbatten dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Sementara itu, Pakistan, yang terdiri dari wilayah mayoritas Muslim, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah dan Perdana Menteri Liat Ali Khan. Meskipun pembagian ini berhasil menciptakan dua negara merdeka, prosesnya tidak berjalan tanpa masalah. Perpindahan massal penduduk, konflik perbatasan, dan pembantaian massal menjadi bagian tragis dari transisi menuju kemerdekaan, yang dampaknya dirasakan hingga saat ini di kedua negara tersebut.

3.2. Konflik Kashmir

Berawal dari warga Muslim di India membangun negara sendiri yakni Pakistan. Muncul keterkaitannya dengan wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, sedangkan pemimpin mereka beragama Hindu. Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir sebagai wilayah dari Negara Kepangeranan (*Indian Princely States*) diberikan pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian dari India atau Pakistan (Information Service of India). Hari Singh sebagai pemimpin Kashmir berfikir untuk tidak bergabung dengan kedua negara tersebut dan berkeinginan untuk menciptakan negara baru. Pada 27 oktober 1947 Hari Singh menyatakan bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya (Musidi, 2012). Hal tersebut membuat warga Pakistan dan Kashmir yang beragama Muslim tidak terima dengan keputusan tersebut. Keputusan tersebut menjadikan Kashmir sebagai kawasan sengketa yang tak terselesaikan.

Konflik di wilayah Kashmir telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah hubungan internasional, yang berawal dari perselisihan antara India dan Pakistan mengenai klaim atas

wilayah ini. Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak pembagian India pada tahun 1947, di mana Kashmir, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang Maharaja Hindu yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan India. Keputusan ini memicu kemarahan Pakistan, yang merasa bahwa Kashmir seharusnya menjadi bagian dari negaranya berdasarkan prinsip mayoritas Muslim. Pertikaian ini menyebabkan beberapa konflik militer dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di kawasan tersebut, yang akhirnya memaksa kedua negara untuk membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan harapan mendapatkan solusi yang adil dan damai.

Sebagai badan internasional yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, PBB menerima rujukan ini dengan penuh perhatian, menyadari bahwa ketegangan di Kashmir dapat memiliki dampak besar terhadap stabilitas di Asia Selatan dan juga terhadap perdamaian global. Diskusi internasional yang panjang dan diplomasi yang intensif pun berlangsung, dengan berbagai negara anggota PBB berupaya mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1948, setelah serangkaian negosiasi dan upaya mediasi, PBB akhirnya mengadopsi sebuah resolusi yang menyatakan bahwa masa depan Kashmir harus ditentukan melalui penentuan nasib sendiri oleh rakyat Kashmir. Ini merupakan langkah penting, karena memberikan rakyat Kashmir hak untuk memutuskan masa depan mereka sendiri melalui mekanisme yang diakui secara internasional.

Resolusi PBB tersebut mengusulkan dilaksanakannya sebuah referendum di wilayah Kashmir di bawah pengawasan langsung PBB, untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan secara adil dan transparan. Referendum ini dimaksudkan untuk memberi rakyat Kashmir pilihan apakah mereka ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Namun, meskipun resolusi ini memberikan harapan bagi penyelesaian konflik yang damai, implementasinya menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Kedua belah pihak memiliki

pandangan yang berbeda mengenai syarat dan pelaksanaan referendum tersebut, yang menyebabkan terjadinya kebuntuan selama beberapa dekade.

Konflik ini terus berlanjut hingga hari ini, dengan berbagai upaya diplomasi dan negosiasi yang masih berlangsung dalam upaya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun resolusi tersebut memberikan harapan akan adanya penyelesaian damai, kenyataannya, implementasi dari keputusan PBB ini mengalami banyak hambatan dan tidak pernah terealisasi. Berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat antara India dan Pakistan mengenai detail pelaksanaan referendum, serta situasi keamanan yang tidak stabil di Kashmir, menyebabkan rencana referendum ini gagal dilaksanakan. India menolak pelaksanaan referendum dengan alasan integritas teritorial dan keamanan nasional, sementara Pakistan menuduh India berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap resolusi PBB. Kegagalan ini menambah kompleksitas konflik, memperpanjang penderitaan rakyat Kashmir, dan menciptakan ketegangan yang semakin mengakar antara kedua negara.

Konflik yang berlangsung dari Oktober 1947 hingga Desember 1948 ini menjadi perang pertama antara India dan Pakistan, dan memiliki dampak yang mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Perang ini tidak hanya membentuk garis batas *de facto* yang dikenal sebagai Line of Control (LoC), tetapi juga menciptakan suasana ketidakpercayaan yang mendalam antara India dan Pakistan, yang terus berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Setelah perang ini, kedua negara mengadopsi kebijakan luar negeri yang saling curiga dan sering kali berlawanan, yang semakin mempersulit upaya-upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut. Perang Kashmir pertama ini juga menjadi titik awal dari serangkaian konflik militer dan ketegangan yang terus berlanjut, menjadikan hubungan India-Pakistan sebagai salah satu yang paling rumit dan berisiko di dunia internasional (Musidi, 2012).

Ketika Kashmir bergabung dengan India, pasukan payung India dikerahkan ke Srinagar pada 27 Oktober 1947. Keterlibatan pasukan India di Kashmir dengan cepat memperluas wilayah perselisihan dengan Pakistan.

Wilayah konflik hanya terbatas pada wilayah Jammu-Kashmir berupa pertempuran darat. Perang tersebut berakhir dengan ditetapkannya garis gencatan senjata, atau *Case Fire Line*, di wilayah Kashmir, dan status wilayah tersebut masih menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Pada dasarnya garis batas tersebut membagi Kashmir menjadi dua wilayah yaitu Pakistan atas Kashmir (PoK) dan India atas Kashmir (IoK). Wilayah timur (Lembah Kashmir, Jammu, Ladakh) dijaga oleh pasukan India, yang berdekatan. Bagian barat (dikenal sebagai Azad Kashmir) dikuasai oleh Pakistan.

3.3. Kondisi Sosial Politik

Kondisi politik India telah lama mengalami berbagai gejolak ketika berbagai kerajaan saling berperang di masa-masa awal invasi Arab. Seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, setelah wafatnya Candragupta II, keadaan mulai kacau hingga munculnya Raja Harsha Vardhana di Qannauj, memulihkan stabilitas politik, namun kemudian setelah wafatnya sang raja, kerajaan tersebut hancur berkeping-keping, disusul dengan pecahnya kerajaan. Kerusuhan di mana putra mahkota merebut kekuasaan. Negara ini (India) sering mengalami gejolak politik terburuk dalam 50 tahun terakhir. Wilayah negara lainnya terbagi di antara banyak penguasa independen dengan kekuasaan dan pangkat yang berbeda-beda.

Sistem pemerintahan kerajaan itu terdiri dari raja, menteri, kepala daerah provinsi (Uparika), bupati, dan kepala desa. Raja, sebagai kepala pemerintahan, juga menggabungkan semua kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer. Jabatan ini bersifat turun temurun, namun terkadang raja juga dipilih. Peran menteri adalah membantu dan menasihati raja. Sistem kerajaan ini juga memiliki provinsi milik kerajaan yang dipimpin oleh Uparika. Kemudian provinsi tersebut juga dimekarkan menjadi beberapa distrik yang disebut Vaisaya (Pejabat distrik disebut Vaisayapati). Pada saat yang sama, desa adalah unit administrasi terkecil yang diatur oleh Panchayat.

ondisi sosial India menunjukkan keragaman yang sangat kompleks, terutama karena masyarakatnya yang multinasional dan terbagi dalam berbagai kelompok budaya. Perbedaan budaya ini telah membentuk struktur sosial yang khas, di mana sistem keagamaan Hindu memainkan peran yang sangat penting. Hinduisme membagi masyarakat India menjadi empat kasta utama: Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Pembagian kasta ini bukan hanya menjadi dasar dalam struktur sosial, tetapi juga memengaruhi interaksi sehari-hari, hak-hak sosial, dan peran yang dipegang oleh individu dalam masyarakat.

Di dalam sistem kasta ini, suku Arya termasuk dalam tiga kasta tertinggi (Brahmana, Ksatria, dan Vaisya), sementara suku Dravida sebagian besar berada di kasta Sudra. Di luar empat kasta utama ini, terdapat kelompok besar lainnya yang dikenal sebagai Paria atau Dalit, yang sering kali menghadapi diskriminasi berat dan hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kelompok Paria ini dianggap sebagai kelompok yang berada di luar kasta dan sering kali dijauhi oleh masyarakat umum. Mereka dilarang berpartisipasi dalam banyak aspek kehidupan sosial dan keagamaan, dan gerak mereka terbatas oleh norma-norma sosial yang sangat ketat.

Dalam masyarakat India yang dibagi oleh sistem kasta, perkawinan biasanya dilakukan di dalam kasta yang sama, dan pernikahan antar kasta sangat jarang terjadi. Hal ini semakin memperkuat pembagian sosial yang ada. Selain itu, poligami merupakan praktik yang cukup umum di masyarakat India pada saat itu, meskipun aturan ini hanya berlaku untuk laki-laki. Perempuan, di sisi lain, tidak diperbolehkan menikah lagi jika suaminya meninggal atau menceraikannya, yang menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat yang sudah terfragmentasi oleh kasta dan budaya. Secara umum masyarakat India dapat dikatakan sejahtera. Masyarakatnya sejahtera, pertanian menjadi kegiatan utama warga setempat. Bangla dan Gujarat dikenal sebagai produsen dan eksportir tekstil kapas. Setidaknya keadaan

perekonomian seperti ini dapat dirasakan oleh masyarakat pada masa kejayaan kerajaan India seperti pada masa raja Asoka dari Kerajaan Maurya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Konflik Kashmir muncul bermula dari perebutan wilayah India yang dihuni antara umat Hindu dan umat Muslim, berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Pada dasarnya garis batas tersebut membagi Kashmir menjadi dua wilayah yaitu Pakistan atas Kashmir (PoK) dan India atas Kashmir (IoK). Wilayah timur (Lembah Kashmir, Jammu, Ladakh) dijaga oleh pasukan India, yang berdekatan. Bagian barat (dikenal sebagai Azad Kashmir) dikuasai oleh Pakistan. Keadaan kehidupan masyarakat India masyarakatnya sejahtera, pertanian menjadi kegiatan utama warga setempat. Bangla dan Gujarat dikenal sebagai produsen dan eksportir tekstil kapas. Setidaknya keadaan perekonomian seperti ini dapat dirasakan oleh masyarakat pada masa kejayaan kerajaan India seperti pada masa raja Asoka dari Kerajaan Maurya.

5. Daftar Pustaka

- Aisyah, A. (2014). Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2).
- Ayunda, M. K. (2017). Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970). *Risalah*, 4(6).
- Butalia, U. (2002). *Sisi Balik Senyap: Suara-Suara dari Pemisahan India*. Indonesia Tera.
- Charinda, D. E. (2019). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tentang Perlindungan Sipil dalam Sengketa Wilayah Kashmir 2010-2014. Skripsi. Universitas Lampung.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1),33-54.

- Gana Islamika.com. (2019, 7 Januari). *Pakistan (14): Sejarah dan Dinamika Kenegaraan (1)*. Diakses pada 28 Desember 2023, Available from <https://ganaislamika.com/pakistan-14-sejarah-dan-dinamika-kenegaraan-1/>
- Haqqi, H., & IP, S. (2021) *Studi Diplomasi Kawasan Asia Selatan*. Unisri Press.
- Hennida, C. (2012). Perubahan Iklim dan Potensi Konflik di Kawasan Asia Selatan. *Jurnal Global & Strategis*, 6(2). Available from <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5d48ac58a32full.pdf>
- Information Service of India. *Masalah Kashmir*. (Djakarta: Information Service of India, ____).
- Khairunnisa, B. W. (2021). Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kashmir dan Peluang Mediator Bagi Indonesia. *Jurnal Harian Regional*, 3(2), 114-126.
- Kristiawan, A.S. (2020). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, ICT Development Index dan Good Governance Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Anggota ASEAN Dan SAARC Kategori Lower-Upper Medium. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 140-156.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2020). Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019. *Balcony*, 4(2), 103-114.
- Suwarno. (2012). *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wulansari, I. (2022). Ancaman Konflik Pengaturan Air di Asia Selatan. <https://repository.paramadina.ac.id/441/>